

SKRIPSI

KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM KONTESTASI POLITIK

**(Studi Tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Keterlibatan
Perempuan Dalam Pemilihan Walikota Makassar 2020)**

Di Susun Dan Diajukan Oleh:

GUSTIANI

E111 16 013



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Halaman Pengesahan Skripsi

Keterlibatan Perempuan Dalam Kontestasi Politik
(Studi Tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Keterlibatan Perempuan
Dalam Pemilihan Walikota Makassar 2020)

Disusun Dan Diajukan Oleh :


Gustiani
E111 16 013

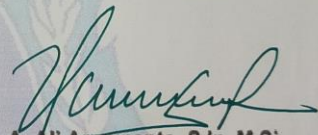
Telah Di Pertahankan Dihadapan Panitia Ujian Yang Dibentuk Dalam Rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 10 Februari 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Dr. Ariana Yunus S.Ip. M.Si
Nip. 197107051998032002


A. Ali Armananto, S.Ip. M.Si
Nip. 198011142008121003

Mengetahui,

Ketua Departemen
Ilmu Politik


Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D
Nip. 196212311990021023

HALAMAN PENERIMAAN

HALAMAN PENERIMAAN

Skripsi

Keterlibatan Perempuan Dalam Kontestasi Politik (Studi Tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Keterlibatan Perempuan Dalam Pemilihan Walikota Makassar 2020)

Disusun dan diajukan oleh:

GUSTIANI

E111 16 013

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi

Pada program studi Ilmu Politik

Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada Rabu, 10 Februari 2021

Menyetujui

Panitia Ujian

Ketua	: Dr. Ariana Yunus, S.IP.,M.Si	(.....)
Sekretaris	: A. Ali Armunanto, S.IP.,M.Si	(.....)
Anggota	: Haryanto, S.IP.,M.A.	(.....)
Anggota	: Umni Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.Si	(.....)
Pembimbing 1	: Dr. Ariana Yunus, S.IP.,M.Si	(.....)
Pembimbing 2	: A. Ali Armunanto, S.IP.,M.Si	(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gustiani
Nim : E11116013
Program Studi : Ilmu Politik
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul:

(Keterlibatan Perempuan Dalam Kontestasi Politik " Studi Tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Keterlibatan Perempuan Dalam Pemilihan Walikota Makassar 2020). Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 09 februari 2021

Yang menyatakan



Gustiani

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penyusunan Skripsi dapat selesai di waktu yang tepat. Skripsi ini berjudul “Keterlibatan Perempuan Dalam Kontestasi Politik, (Studi Tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Keterlibatan Perempuan Dalam Pemilihan Walikota Makassar 2020)”. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa strata satu (S1), untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Program Studi Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Rafiuddin dan Ibunda Suriyani yang sangat berjasa merawat, membesarkan, mendidik, mendoakan, memotivasi mendukung penuh di setiap jenjang pendidikan penulis hingga sekarang sampai di tahap ini. Kepada kedua saudara penulis saudara Fajril dan saudari Afriani yang senantiasa memberi support dan doanya dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. M. Basyir Syam, M.Ag, (Alm), Ibu Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.Si Dan Bapak A. Ali Armonanto S.IP, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dari berbagai pihak telah memberikan dukungan, bantuan petunjuk serta motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan yang positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ruang kepada penulis selama menempuh pendidikan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin
3. Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si selaku Wakil Dekan I Bidang Riset dan Inovasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis dalam urusan akademik.
4. Bapak Dr. Suparman Abdullah, M.Si selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Perencanaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi.
5. Bapak Dr. Hasrullah, M.Si selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan kemahasiswaan.

6. Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan administrasi di Departemen Ilmu politik.
7. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : Bapak Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, MA (Alm), Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag (Alm), Bapak Drs. A. Yakub, M.Si, Bapak Dr. Muhammad Saad, MA, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, Ibu Dr. Ariana Yunus, M.Si, Bapak Dr. Muh. Imran, S.IP, M.Si, Ibu Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Ibu Ummi Suci Fathya Bailusy, M.Si, Bapak Zulhajar, S.IP, M.Si, Bapak Haryanto, S.IP., M. A., Bapak Muhammad Reza Syamsuri S.IP,. M.IP dan Ibu Dian Ekawati S.IP, M.Si yang telah memberikan banyak ilmu, saran, dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Kepada seluruh pegawai dan Staf Departemen Ilmu Politik, Khususnya, Bapak Aditya, Bapak Hamzah, Ibu Hasna dan Ibu Rini yang telah senantiasa membantu penulis dalam urusan-urusan administrasi.
9. Kepada anggota partai Bapak A.M. Amin Karaka (Partai Gerindra), Bapak Ais Sakar (PDIP), Drs. H. Ahkam Supu (Partai Golkar),

Rahmat Hidayat (PKB) selaku narasumber/informan penelitian kategori Anggota Partai atas kesediannya menerima penulis dan menyisihkan waktu untuk melakukan wawancara terkait data-data yang penulis butuhkan dalam proses penyelesaian Skripsi ini.

10. Kepada Habibah Anggraeni, Lutfiah Ainiyah A, Imran, Rezky Pracilia Nurmalasari R, Dwi Srianti S selaku narasumber/informan penelitian kategori Pemilih Pemula atas kesediannya menerima penulis dan menyisihkan waktu untuk melakukan wawancara terkait data-data yang penulis butuhkan dalam proses penyelesaian Skripsi ini.

11. Kepada Ibu Marlina, Rina, Rahmawati, dan Bapak Ismail selaku narasumber/informan penelitian kategori masyarakat umum Kota Makassar atas kesediannya menerima penulis dan menyisihkan waktu untuk melakukan wawancara terkait data-data yang penulis butuhkan dalam proses penyelesaian Skripsi ini.

12. Hafida, Fedora Esperanza, St. Nur Sulhulaeva, Nur. Wahyuni Rahma, Naufal Asyiri Banuarli, Wanda Aprilia, Indah Rahayu, Ira Andriani, Widya Hasri Ainun, Alfadilla Tri Pratiwi, Nurul Fitri Mutmainnah, Apriani Kurnia Srinadila Jafar, Anggi Nur wahyudi, dan Seluruh teman Angkatan 2016 yang merupakan teman-teman angkatan yang setia dalam mengerjakan proposal, penelitian, sampai penyusunan Skripsi.

13. Kepada sahabatku terkasih Indah Kalsum S.T, Radia Al Adawia, Al Amin, yang telah menemani, dan mensupport penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin dan memberikan banyak motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
14. Kepada Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin yang telah memberi ruang kepada penulis untuk berproses dalam organisasi.
15. Kepada teman-teman Posko Desa Bacu KKN UNHAS Gelombang 102 : Mustika Hajar, Mayang Raj, Irmayani, Kak James, Renaldi, dan Rey yang telah bersama-sama berproses pada saat KKN demi melengkapi salah satu Tri Dharma perguruan tinggi.
16. Terakhir untuk seluruh keluarga besar penulis, terutama untuk om, tante, sepupu, penulis yang sedikit banyaknya telah menyusahkan selama menempuh pendidikan dan penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini masih terdapat kekurangan dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Namun, penulis meyakini bahwa setiap kekurangan dan kelebihan dalam skripsi ini akan ada banyak makna yang dapat di petik untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik kedepannya. Oleh karena itu, segala masukan berupa saran dan kritikan yang membangun senantiasa penulis terima bagi semua pihak untuk meningkatkan kualitas

penelitian dan penyusunan skripsi ini dan untuk memperbaiki karya ilmiah penulis selanjutnya.

Makassar, Januari 2021

Penulis

ABSTRAK

Gustiani. E111 16 013, dengan judul Skripsi “Keterlibatan Perempuan Dalam Kontestasi Politik: Studi Tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Keterlibatan Perempuan Dalam Pemilihan Walikota Makassar”. Di bawah bimbingan Ibu Dr. Ariana Yunus, S. Ip. M.Si selaku pembimbing I dan Bapak A. Ali Armunanto, S.IP. M.Si sebagai pembimbing II

Perempuan merupakan makhluk yang diberikan begitu banyak anugerah, keterlibatannya dalam segala aspek kehidupan mempunyai hal tersendiri seperti halnya dalam dunia politik, sebuah keniscayaan untuk mengakomodir segala kepentingan perempuan dalam kebijakannya untuk memberi hal baru bagi dunia politik. Keterlibatan perempuan yakni dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar belum bisa dikatakan sukses. Dengan melihat dari dua periode pemilihan walikota Makassar yakni 2013 dan 2018 belum ada perempuan yang berhasil lolos menjabat sebagai walikota maupun wakil walikota, yakni jumlah penduduk dengan jumlah pemilih perempuan lebih tinggi.

Sehingga penelitian ini diadakan agar bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi atau pandangan masyarakat terkait keterlibatan perempuan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar, tepatnya di Kecamatan Tamalate dengan batas wilayah penelitian yakni kelurahan Pabaeng-Baeng dan Kelurahan Mangasa. Metode yang digunakan adalah metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yakni proses wawancara mendalam kepada beberapa informan serta dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dengan adanya perempuan yang kemudian terlibat dalam kontestasi politik khususnya dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor diantaranya kultur atau budaya dimana beberapa masyarakat pada umumnya masih memegang teguh “*Siri*” atau *Ade’* yakni terkait perempuan yang bekerja di luar rumah atau *Wari* (aturan ketatalaksanaan yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajaran). Kemudian “*Rapang*” (kejadian masalah adalah teladan untuk masa kini) dan ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang UU kuota 30% perempuan.

Kata Kunci: Perempuan dan Politik

ABSTRACT

Gustiani. E111 15 013, With the title of Thesis "The Involvement of Women in Political Contestations: A Study of Women's Involvement in the Election of Makassar Mayor". Under the guidance of Dr. Mrs. Ariana Yunus, S. Ip. M.Si as supervisor I and Mr. A. Ali Armunanto, S.IP. M.Si as supervisor II.

Women are creatures that are given so many gifts, their involvement in all aspects of life has its own thing as in the world of politics, a necessity to accommodate all women's interests in their policies to give new things to the world of politics. The involvement of women in the elections for the mayor and deputy mayor of Makassar has not been successful. By looking at the two periods of the election for the mayor of Makassar, namely 2013 and 2018, there have been no women who have successfully qualified as mayor or deputy mayor, namely the number of residents with a higher number of female voters.

So this research was held in order to find out how the perceptions or views of the community regarding the involvement of women in the election of the mayor and deputy mayor of Makassar, to be precise in Tamalate District with the research area boundaries, namely Pabaeng-Baeng and Mangasa villages. The method used is descriptive method with a qualitative approach. The technique used in data collection is the in-depth interview process with several informants as well as from other sources related to this research.

The results showed that the public perception of women who were then involved in political contestation, especially in the election of the mayor and deputy mayor of Makassar, was influenced by several factors, including culture or culture where some people generally still hold firm "Siri" or Ade ', which is related to women. who work outside the home or Wari (management rules governing everything that is acceptable to reasonableness). Then "Rapang" (the past incident is an example for the present) and there are some people who do not know about the 30% women's quota law.

Keywords: Women and Politics

DAFTAR ISI

SAMPUL

Daftar Isi	i
------------------	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Telaah Pustaka	12
2.2. Konsep Persepsi/ Pandangan	14
2.2.1 Definisi Persepsi/ Pandangan	14
2.2.2 Bentuk-Bentuk Persepsi	17
2.2.3 Macam-macam Persepsi	20
2.2.4 Proses Terjadinya Persepsi	20
2.2.5 Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	21
2.3. Persepsi Sosiologis	23
2.4. Kerangka Teori	27
2.4.1 Teori Prilaku	
2.5. Konsep Partisipasi Masyarakat	32
2.5.1 Partisipasi Masyarakat	
1. Pengertian Partisipasi	32
2.5.2 Bentuk-bentuk partisipasi.....	37
2.5.3 Jenjang Partisipasi politik	42
2.6. Kerangka Berfikir	46

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Dasar Penelitian	47
3.2. Lokasi Penelitian	49
3.3. Informan Penelitian	49
3.4. Sumber Data	51
3.5. Teknik Pengumpulan Data	52
3.6. Teknik Analisis data	54

BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kota Makassar	55
4.2. kondisi Sosial Politik Kota Makassar	58
4.3. Gambaran Umum Kecamatan Tamalate	58
4.4. Pemilihan Walikota Makassar	60

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM KONTESTASI POLITIK

5.1. Perempuan dalam pemilihan walikota Makassar	61
5.2. Persepsi Masyarakat terhadap keterlibatan Perempuan dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar.....	64

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	74
6.2. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA.....

Lampiran.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu wujud pelaksanaan negara yang demokratis adalah dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu sebagai sarana demokratisasi telah digunakan di sebagian negara tidak terkecuali Indonesia yang notabene memiliki masyarakat yang heterogen. Pemilu sering diartikan sebagai suatu kegiatan yang dinilai sebagai wujud atau parameter suatu negara demokratis atau tidak, akan tetapi dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi itu sendiri, karena masih terdapat manipulasi politik, kecurangan, ketidakadilan, mobilisasi, money politic, yang menimbulkan persoalan yang berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi jalannya pemerintahan.

Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi dengan tujuan untuk memilih anggota Legislatif dan Eksekutif (Presiden/Kepala Daerah). Kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota yang sebelumnya dipilih oleh DPRD berganti dipilih secara langsung oleh rakyat dengan harapan mengembalikan kedaulatan pada pemiliknya. Tujuan lainnya adalah untuk menghindari praktik money politics dan reduksi dari para elit partai dalam pemilihan kepala daerah. Tahun 2014 mekanisme pemilihan kepala daerah kembali mengalami perubahan, dari memilih secara langsung menjadi secara perwakilan melalui DPRD yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ternyata mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kegentingan yang memaksa, maka dikeluarkan Perpu No 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dikembalikan kembali kepada rakyat, yaitu pemilihan secara langsung.

Dalam kontestasi politik yang saya maksudkan dalam proposal yang saya tuliskan disini ialah Pilkada yakni dalam hal ini ialah terkait pemilihan Walikota khususnya pada kota Makassar tahun 2020 ini. Perlu kita ketahui bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya merupakan bagian penting kehidupan bernegara Indonesia di era Reformasi. Penyelenggaraan Pemilu termasuk Pilkada merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Pada sistem demokrasi tidak langsung (indirect democracy) atau demokrasi perwakilan (representative democracy), dilaksanakannya Pilkada bertujuan agar Kepala Daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu.¹

¹ JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 2, Juli 2017 ISSN 2527-7057 (Online), ISSN 2545-2683 (Printed) Hlm. 36 (file:///C:/Users/acers/Downloads/509-2301-1-PB%20(1).pdf)

Keterlibatan Perempuan yang saya maksudkan disini ialah khususnya pada pemilihan kepala daerah, seperti yang kita ketahui fenomena politik yakni keterlibatan perempuan dalam pemilihan Walikota Makassar. Wali Kota adalah kepala daerah untuk daerah Kota atau Kota madya. Seorang Wali Kota sejajar dengan Bupati, yakni Kepala Daerah untuk daerah Kabupaten. Pada dasarnya, Wali Kota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota. Wali kota dipilih dalam satu paket pasangan dengan Wakil Wali Kota melalui Pilkada. Wali kota merupakan jabatan politis, dan bukan Pegawai Negeri Sipil.²

Ketentuan mengenai kepala daerah dan wakil kepala daerah secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ("UU 23/2014") sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keikutsertaan perempuan dalam perpolitikan merupakan bentuk partisipasi politik dalam bentuk aktif karena paraperempuan tersebut menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam organisasi politik. Keterpilihan dan perolehan suara perempuan dalam panggung perpolitikan pun menjadi perhatian tersendiri sebab setiap dalam pemilihan walikota dengan keterlibatan perempuan pun tidak ada yang lolos atau terpilih dalam pemilihan walikota Makassar tersebut, entah itu perempuan yang diusung sebagai walikota Makassar maupun

² Daftar Walikota Di Indonesia (https://id.wikipedia.org/wiki/Wali_kota)

perempuan yang diusung sebagai calon Wakil Walikota. Dengan melihat jumlah penduduk yang ada di kota Makassar dari data 2010 yakni sebanyak 1,339 juta. Kemudian jika kita hubungkan dalam pemilu khususnya, dapat kita lihat berdasarkan informasi KPU, jumlah pemilih Pilkada Makassar berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) laki-laki sebanyak 382.546 jiwa dan perempuan 404.647 jiwa dengan total pemilih 804.938 jiwa. Sementara yang menggunakan hak pilihnya tercatat, laki-laki 213.458 jiwa, dan perempuan 247.492 jiwa, dengan total 471.248 jiwa, serta partisipasi pemilih sebesar 58,54 persen.

Melihat dari persentase jumlah penduduk dan jumlah pemilih bahkan pada segi jumlah pemilih perempuan pun lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kemudian jika kita merujuk pada praturan yakni mengenai pemenuhan kuota 30% perempuan.

Setiap masyarakat tentu memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam sebuah negara, termasuk hak untuk berperan aktif dalam proses-proses politik. Untuk menciptakan nuansa kesetaraan hak politik antara laki-laki dan perempuan maka dibuatlah undang-undang pemilu No.12 Tahun 2003, dimana isinya menyatakan bahwa pentingnya upaya afirmasi bagi peningkatan partisipasi politik perempuan dengan menetapkan kuota 30% bagi setiap partai untuk menempatkan perempuan dalam parlemen baik di tingkat nasional ataupun lokal. Tujuan utama dari penetapan kuota 30% bagi perempuan selain sebagai upaya

penyetaraan gender juga sebagai sarana agar perempuan mampu menjadi aktor penting dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.

Akan tetapi dalam implementasi kuota 30% ini, nyatanya masih belum mampu menyelesaikan ketimpangan antara laki- laki dan perempuan dalam proses politik. Kuota 30% perempuan yang semula bertujuan untuk menyetarakan peran laki- laki dan perempuan dalam kegiatan politik (membuat kebijakan dan pengambilan keputusan) ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia politik, pertama masih kentalnya budaya patriarki di masyarakat, dimana dalam pandangan patriarki perempuan dipandang sebagai individu yang irasional, terutamanya dalam hal pembuatan kebijakan- kebijakan politik sehingga menjadikan posisi perempuan dalam kegiatan politik selalu diambil alih oleh laki- laki. Kedua yaitu adanya anggapan bahwa perempuan hanyalah makhluk rumahan yang menjadikan peran mereka hanya terbatas pada ranah rumah tangga (mengurus anak, menjaga rumah) sehingga kesempatan untuk terjun langsung ke dunia politik hampir tidak ada. Ketiga yaitu adanya anggapan kultural bahwa adanya ketidak etisan ketika perempuan mengerjakan hal yang sama seperti laki- laki dalam hal politik seperti menjadi pemimpin dan menduduki jabatan struktural setinggi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun walikota dan wakil walikota.

Melihat dari jumlah penduduk utamanya dalam konteks jumlah pemilih dari data pemilih tetap kota Makassar disimpulkan dengan banyaknya persentasi pemilih perempuan dibandingkan dengan laki-laki dan jika dihubungkan dengan beberapa pemilu yang telah dilakukan dengan adanya keterlibatan perempuan khususnya pada Pemilihan Walikota Makassar dengan keterlibatan perempuan dengan ini belum ada walikota maupun wakil walikota Makassar yang lolos terpilih dan atau menjabat.

Dengan hal itu dilihat di kota Makassar ini sendiri dengan kontes dalam pemilihan Walikota Makassar dilihat sangat kurang perempuan yang terlibat dalam Pemilihan walikota dibuktikan dengan data yang saya dapatkan yakni sebagai berikut:

Penulis mengambil dari data keterlibatan perempuan dalam pencalonan walikota dan wakil walikota pada tahun 2013 sampai sekarang. Dimulai dari KPUD Kota Makassar telah menetapkan sepuluh pasang kandidat peserta Pilwalkot Makassar 2013. Pada 25 Juli lalu, KPUD telah mengundi nomor urut peserta Pilwalkot Makassar

No.	Pasangan calon	Pendukung
1.	Adil Patu dan Isradi Zainal	PDK, Partai Gerindra
2.	Supomo Guntur dan Kadir Halid	Partai Golkar, PDIP
3.	Rusdin Abdullah dan Idris Patarai	Independen
4.	Herman Handoko dan Latief Bafadhal	Independen
5.	Erwin Kallo dan Hasbi Ali	Independen
6.	Tamsil Linrung dan Das'ad Latief	PKS, Hanura, PBR
7.	St. Muhyina Muin dan Syaiful Saleh	Independen
8.	Danny Pomanto dan Syamsu Rizal	Partai Demokrat, PBB
9.	Irman Yasin Limpo dan Busrah Abdullah	PAN, PPP
10.	Apiaty Amin Syam dan Zulkifli Gani Ottoh	koalisi 20 parpol non parlemen ³

Dari tabel di atas maka jelas kita lihat kaitannya dengan judul yang saya angkat yakni terkait dengan keterlibatan perempuan dalam kontestasi politik, dari beberapa calon walikota dan wakil walikota di atas terlihat hanya satu perwakilan perempuan dalam pencalonan walikota pada tahun 2013 lalu yakni St.Muhyiana muin sebagai calon walikota dengan wakil syamsul Rizal yakni melalui jalur independen.

Kemudian pada tahun 2018 keterlibatan perempuan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar terlihat dengan calon sebagai berikut:

³ KPUD Kota Makassar telah menetapkan sepuluh pasang kandidat peserta Pilwalkot Makassar 2013. Pada 25 Juli. Diakses pada sabtu 22, Agustus 2020.

Nomor uruta	Pasangan calon	Pendukung	Singkatan
1.	Munafri Arifuddin Andi Rahmatika Dewi	Nasdem, Golkar PDI-P, Gerindra, Hanura, PKB, PPP, PBB, PKS,PKPI	Appi-Cicu
Diskualifikasi	Mohammad Ramdhan Pomanto Indira Mulyasari	Independen	Diami

4.

Dapat kita lihat dengan jelas dengan dua calon walikota makassar diatas dengan keterlibatan perempuan sudah semakin jelas sebab keduanya menggandeng perempuan dalam kontestasi politik yakni pada tahun 2018 dalam hal ini Andi Rahmatika Dewi dan Indira Mulya Sari. Namun, sayangnya sebab hal ini muncul permasalahan baru karena calon dari Muhammad Ramdhan Pomanto Dengan Indira Mulyasari yang sekaligus menempuh jalur independen terdiskualifikasi dengan adanya suatu hal. Kemudian dalam kontestasi politik disini dihat dengan Munafri Arifuddin dengan wakil Andi Rahmatika Dewi yang kemudian melawan Kotak Kosong Namun dimenangkan dengan adanya Kotak Kosong. Namun jika kita kaitkan dengan jumlah penduduk perempuan yang kuotanya lebih banyak namun tidak menentukan hasil bahwa perempuan akan menang dalam kontestasi politik ini khususnya di Kota Makassar ini.

Kemudian pada tahun 2020 ini terdapat Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar yakni :

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Wali_Kota_Makassar_2018

Nama Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar	Partai Pendukung
Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi	Nasdem, Gerindra, Berkarya
Syamsu Rizal-Fadli Ananda	PKS, PKB, PDIP, Hanura, PKB.
Irman Yasin Limpo-Zunnun Armin NH	PAN, Dan Golkar
Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando	Demokrat, PPP, Perindo ⁵

Dari data di atas maka dilihat jelas dengan empat orang calon walikota dan wakil walikota hanya terdapat 1 perempuan yang terlibat dalam kontestasi politik yakni mencalonkan sebagai wakil walikota yakni Fatmawati rusdi dengan mendampingi Mohammad Ramdhan Pomanto.

Berdasarkan uraian di latar belakang yang telah di tuliskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul keterlibatan perempuan dalam kontestasi politik. (studi tentang pandangan masyarakat terhadap keterlibatan perempuan dalam pemilihan Walikota Makassar 2020)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Persepsi atau pandangan Masyarakat Tentang Keterlibatan Perempuan dalam Pemilihan Walikota Makassar?

⁵Makassar.Terkini.id
<https://makassar.terkini.id/kpu-makassar-tutup-pendaftaran-calon-wali-kota-dan-wakil-wali-kota/>

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap keterlibatan Perempuan dalam kontestasi politik (pilkada) dalam pemilihan Walikota Makassar khususnya merujuk dalam pemilu 2020 yang kemudian adanya perempuan yang di usung oleh partai. Adapun tujuan utama atau sasaran dalam penelitian ini ialah:

1. Memberikan gambaran analisis mengenai persepsi atau pandangan masyarakat tentang keterlibatan perempuan sebagai peserta pada pemilihan walikota tahun 2020.
2. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi persepsi atau pandangan masyarakat tentang keterlibatan perempuan sebagai Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari kegiatan penelitian ini ialah akan di lihat berdasarkan dua manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu memberikan pemahaman terkait fenomena keterlibatan Perempuan dalam kontestasi politik yakni pada konteks Pilkada terkhusus pada pemilu ini yang dilihat dari adanya perempuan yang diusung oleh partai dengan mengukur bagaimana pandangan masyarakat melihat fenomena tersebut.

2. Manfaat praktis

Manfaat Penelitian ini secara kegunaan praktis yaitu mampu menjadi sebuah upayah kongkrit untuk menyelesaikan berbagai permasalahan khususnya dalam mengenai fenomena keterlibatan perempuan dalam Pilkada khususnya dalam pemilihan calon walikota 2020 di kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. TELAHAH PUSTAKA

Penelitian ini bukanlah penelitian pertama yang secara khusus membahas mengenai perempuan dan politik. Hal ini dapat kita lihat melalui beberapa penelitian sebelumnya yang mengambil tema yang sama diantaranya yaitu sebagai berikut:

Pertama yakni jurnal yang berjudul Perempuan Dan Politik dalam studi kasus yakni Perempuan dalam Kontestasi Pilkada Di Jombang. Dalam jurnal ini lebih menekankan pada pembahasan pemberian hak yang setara antara perempuan dan laki-laki dimana dalam hal ini dalam kontestasi politik Jombang, perempuan sebagai aktor politik dalam kontestasi ini juga dijamin oleh adanya partisipasi politik masyarakat perempuan. Disini perempuan sebagai salah satu kelompok marginal sampai saat ini masih berada dalam posisi subordinat dibanding laki-laki. Meskipun secara kuantitatif jumlah perempuan lebih banyak, namun hal ini tidak berarti ada jaminan terhadap hak-hak mereka. Factor budaya merupakan salah satu penghambat bagi perempuan untuk tampil dalam ruang public. Kuatnya peran laki-laki dalam kehidupan publik, sangat menentukan setiap keputusan-keputusan yang diambil meskipun itu menyangkut tentang kehidupan perempuan. Hal ini menempatkan posisi perempuan semakin termarginalkan, terutama dalam partisipasi politik semata-mata karena mereka adalah perempuan. Inilah yang disebut

sebagai diskriminasi gender. Kehidupan demokrasi yang sejati merupakan suatu kehidupan dimana seluruh masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama dalam bersuara dan didengar. Peran politik sangat penting untuk mendorong kebijakan berkeadilan sosial, terutama kebijakan yang berkaitan dengan perempuan. Sementara melalui kebijakan, hukum dapat berlaku melindungi kepentingan kaum perempuan dari berbagai bentuk kekerasan baik di wilayah domestic maupun publik. Begitupun dengan apa yang telah dilakukan dengan actor politik dengan perwakilan perempuan. Munjidah di Jombang yang mengimplementasikan bagaimana perannya sebagai perempuan dalam menjadi actor politik.

Kemudian yang kedua yaitu skripsi berjudul “politik perempuan di kota Makassar (studi terhadap peran politik perempuan partai Nasdem kota Makassar)”, menurutnya bahwa perempuan telah mampu memainkan perannya sebagai anggota legislator dan mulai meninggalkan pandangan patriarkis yang mengatakan bahwa perempuan hanya cocok mengurus ranah domestik (mengurus rumah, menjaga anak) dan tidak berhak untuk mengurus urusan sebesar negara. Menurut juga, peran anggota legislatif perempuan partai Nasdem telah mampu memainkan perannya dengan baik, diantaranya yaitu banyak melakukan sosialisasi terkait permasalahan kesehatan, kesejahteraan serta masalah lingkungan. Kader perempuan partai Nasdem mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakat kota Makassar meskipun partai Nasdem termasuk partai baru dalam perpolitikan Indonesia. Sedangkan peran perempuan

terhadap institusi, dalam hal ini partai nasdem yaitu mereka mampu memainkan perannya dalam rangka memperjuangkan kepentingan perempuan yang disuarakan langsung kepada petinggi partai nasdem, walaupun jumlah kader perempuan di partai nasdem tidak sebanyak kader laki- laki, akan tetapi mereka mampu memberikan sumbangsih besar terhadap partai nasdem.

2.2. KONSEP PERSEPSI/ PANDANGAN

A. Definisi Persepsi (Pandangan)

Dalam hal ini kata “persepsi” atau pandangan seseorang sering kali di gunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun mengartikan kata persepsi disini tentu setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda yakni setiap orang mempunyai persepsi sendiri mengenai apa yang dipikirkan, dilihat, dan dirasakan. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa persepsi menentukan apa yang akan diperbuat seseorang untuk memenuhi berbagai kepentingan baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan masyarakat tempat berinteraksi. Persepsi atau pandangan inilah yang membedakan seseorang dengan yang lain. Persepsi atau pandangan dihasilkan dari kongkritisasi pemikiran, kemudian melahirkan konsep atau ide yang berbeda-beda dari masing-masing orang meskipun

obyek yang dilihat sama. Berikut pengertian persepsi menurut beberapa ahli .⁶

Persepsi (dari bahasa latin *perceptio, percipio*) adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman yang terjadi tentang lingkungan sekitar.

Persepsi atau pandangan juga merupakan sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang merupakan istilah serapan dari Bahasa Inggris yaitu *perception*. Kata *perception* sendiri berasal dari bahasa Latin, *percepto* dan *percipio*, yang berarti pengaturan identifikasi dan penerjemahan dari informasi yang diterima melalui panca indra manusia dengan tujuan untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman di lingkungan sekitar.

Persepsi atau pandangan adalah batasan yang digunakan pada proses memahami dan menginterpretasikan informasi sensoris, atau kemampuan intelek untuk mencarikan makna dari data yang diterima oleh berbagai indra. Persepsi adalah proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh pemikiran.

⁶ M.Syaifullah, Skripsi, Persepsi Santri Terhadap Keterlibatan Kyai Dalam Politik, Universitas Muhammadiyah Malang (<http://eprints.umm.ac.id/29456/>)

Persepsi merupakan suatu proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengamati, menanggapi, memahami, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada di masyarakat dan kemudian ditafsirkan untuk menyelesaikan masalah yang sebelum tidak diketahui.

Jadi, persepsi yaitu proses mengetahui atau mengenali obyek dan kejadian obyektif dengan bantuan indera. Sebagai cara pandang, persepsi timbul karena adanya respon terhadap stimulus. Stimulus yang diterima seseorang sangat kompleks, stimulus masuk kedalam otak, kemudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit baru kemudian dihasilkan persepsi, dalam hal ini persepsi mencakup penerimaan stimulus (inputs), persepsi sebuah proses yang hampir bersifat otomatis, dan ia bekerja dengan cara yang hampir serupa pada masing-masing individu, tetapi sekalipun demikian secara tipikal menghasilkan persepsi-persepsi yang berbeda-beda. Karena itulah persepsi menjadi begitu penting dalam penafsiran individu terhadap keadaan atau kondisi di masyarakat.

Definisi mengenai persepsi atau pandangan yang sejatinya cenderung lebih bersifat psikologis daripada hanya merupakan proses penginderaan saja, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti perhatian yang selektif, individu memusatkan perhatiannya pada rangsang-rangsang tertentu saja. Kemudian ciri-ciri rangsang, rangsang yang bergerak diantara rangsang yang diam akan lebih menarik perhatian.

Selanjutnya adalah nilai dan kebutuhan individu, dan yang terakhir pengalaman dahulu. Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya.⁷

Persepsi atau padangan merupakan suatu proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses ini tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan merupakan proses pendahuluan dari proses persepsi.⁸ Sedangkan menurut Drever Persepsi adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera. persepsi merupakan inti komunikasi. Persepsi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan komunikasi. Artinya, kecermatan dalam mempersepsikan stimuli inderawi mengantarkan kepada keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, kegagalan dalam mempersepsi stimulus, menyebabkan mis-komunikasi hal ini menurut Suranto.

B. Bentuk-Bentuk Persepsi (pandangan)

1. Penglihatan

Penglihatan merupakan indra manusia yang paling utama dan paling penting dalam melihat dan menginterpretasikan apa saja yang terjadi serta dapat mengeluarkan pendapatnya dengan apa yang dilihatnya.

⁷ (Shaleh, 2009).

⁸ Walgito 2010

Artinya bahwa masyarakat menerima dan menangkap informasi ini melalui penglihatan baik secara langsung maupun lewat media, tv, dll.

2. Pendengaran

Syaraf pendengaran merupakan kemampuan manusia untuk memberikan suatu pengamatan terhadap suara yang diterimanya melalui pendengarannya. Frekuensi yang dapat didengar oleh manusia disebut sebagai audio atau sonic.

Sistem pendengaran manusia sendiri terdiri dari 3 bagian yaitu telinga bagian luar yang mengumpulkan dan memfilter suara, telinga bagian tengah yang mengubah tekanan suara dan telinga bagian dalam yang menghasilkan sinyal syaraf untuk diproses oleh otak.

3. Sentuhan

Persepsi *haptic* merupakan proses untuk mengenali berbagai objek melalui sentuhan. Setiap manusia melibatkan kombinasi dari penginderaan dengan pola dan tekstur pada permukaan kulit manusia. Manusia dapat mengenal dan secara akurat mengidentifikasi objek 3 dimensi melalui sentuhan. Ini melibatkan proses eksplorasi seperti menggerakkan jari melalui permukaan luar dari objek atau memegang keseluruhan objek di tangan.

4. Rasa

Rasa merupakan kemampuan untuk memberikan persepsi terhadap apa yang dirasakan oleh manusia dalam menilai apa yang terjadi disekitarnya. Persepsi sosial merupakan bagian dari persepsi yang

memperbolehkan manusia untuk memahami individu dan kelompok dalam dunia sosial mereka, sehingga merupakan bagian dari kognisi sosial.

5. Bicara

Persepsi dalam berbicara merupakan suatu proses dalam bahasa yang didengar, diinterpretasikan dan dimengerti. Riset dalam persepsi berbicara mencoba untuk memahami bagaimana manusia mendengar dan memahami suara yang berisi kata-kata dan menggunakan informasi yang diperoleh untuk memahami bahasa yang diucapkan.

6. Wajah

Persepsi terhadap wajah mengacu kepada proses kognitif yang menspesialisasi pada penanganan wajah manusia termasuk persepsi terhadap identitas dari suatu individu dan ekspresi wajah seperti petunjuk emosional.

7. Sentuhan Sosial

Sentuhan sosial merupakan persepsi yang dibentuk ketika menerima sentuhan dari individu lainnya. Informasi yang diterima dari individu lainnya diterima dan diproses dengan cara yang berbeda dengan informasi sentuhan yang diterima dari interaksi dengan objek lainnya.

8. Persepsi yang terbentuk melalui indra lainnya

Indra lainnya memungkinkan tubuh manusia untuk berbagai macam persepsi seperti gravitasi, keseimbangan tubuh, posisi dari bagian-bagian

tubuh dan bahkan untuk pembuangan urine dan feces, serta sensasi yang dirasakan di dalam kerongkongan dan paru-paru.⁹

C. Macam-Macam Persepsi

Menurut Sunaryo persepsi dibedakan menjadi dua macam, yaitu *Eksternal Perseption* dan *Self Perseption*:

1. *Eksternal Perseption*, yaitu persepsi yang terjadi karena datangnya rangsang dari luar individu.
2. *Self Perseption*, yaitu persepsi yang terjadi karena datangnya rangsang dari dalam individu. Dalam hal ini obyeknya adalah diri sendiri.¹⁰

D. Proses terjadinya persepsi (pandangan)

Proses terjadinya persepsi dimulai dari adanya objek yang menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera. Stimulus yang diterima alat indera diteruskan oleh saraf sensoris ke otak. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang dirasa. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk.¹¹

⁹ Ramadhan Ali, (2001) Modul mata kuliah, persepsi bentuk., hl 22.

¹⁰Sunaryo (2004) persepsi (<http://digilib.uinsby.ac.id/4951/5/Bab%202.pdf>)

¹¹ Walgito, persepsi 2010 (http://eprints.walisongo.ac.id/1586/6/083111023_Bab2.pdf)

E. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

1. Faktor Internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain :
 - Fisiologis. Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.
 - Perhatian. Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap obyek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek.
 - Minat. Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan untuk mempersepsi. Perceptual vigilance merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.

- Kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.
 - Pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.
 - Suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.
2. Faktor Eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Sementara itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah :
- Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus. Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek, maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu obyek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.

- Warna dari obyek-obyek. Obyek-obyek yang mempunyai cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami (to be perceived) dibandingkan dengan yang sedikit.
- Keunikan dan kekontrasan stimulus. Stimulus luar yang penampilannya dengan latarbelakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.
- Intensitas dan kekuatan dari stimulus. Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu obyek yang bisa mempengaruhi persepsi.
- Motion atau gerakan. Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan.

2.3. PERSEPSI SOSIOLOGIS

Secara etimologis kata sosiologis berasal dari bahasa latin yaitu *socius* dan *logos*. *Socius* artinya masyarakat dan *logos* artinya ilmu. Jadi, sosiologis adalah ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan, mengetahui sudut pandang masyarakat melalui persepsi, interaksi sosial, dengan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah sosial.

peneliti menggunakan persepsi sosiologis untuk menjadi pedoman penelitian, serta akan lebih memahami tingkah laku masyarakat melalui

persepsi masyarakat. Selain itu peneliti juga mencari persamaan-persamaan dan perbedaan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain melalui persepsi masyarakat. Jadi, peneliti akan mencoba memahami pikiran, ide gagasan, yang mewujudkan gagasan dan pikiran tersebut, apakah dengan hal tersebut ada persaingan dan konflik yang terjadi di masyarakat.

Persepsi sosiologis juga bertujuan untuk memecahkan suatu masalah karena persepsi masyarakat seringkali didasarkan tentang fakta yang terjadi di masyarakat yang sebelumnya tidak kita ketahui, dengan melalui persepsi masyarakat maka kita akan mendapatkan informasi yang lebih rinci, dengan bertujuan untuk mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan guna memberikan arti bagi lingkungan masyarakat.

Menurut Brehm dan Kassin, persepsi sosiologis adalah penilaian-penilaian terhadap pandangan masyarakat yang terjadi dalam upaya manusia memahami orang lain.

Defenisi sosiologis menurut Pittirim Sorokin mengatakan bahwa sosiologis adalah ilmu yang mempelajari :

- Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan lain sebagainya). Hal ini jika kita kaitkan dalam proposal penelitian maka dapat kita lihat dengan jelas bagaimana

hubungan masyarakat terhadap gejala-gejala social lainnya yakni dalam politik bagaimana masyarakat melihat keterlibatan perempuan yang kemudian terjun dalam dunia perpolitikan utamanya di Indonesia dalam hal ini terkait dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar.

- Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala social dengan gejala-gejala non-social (misalnya gejala geografis, biologis, dan sebagainya).
- Ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial.

Seperti yang kita ketahui bahwasanya persepsi sosiologis adalah proses (aktif) untuk memahami orang lain, dimana masyarakat sebelumnya sudah memiliki dan mendapatkan skema-skema atau informasi tentang keadaan sosial yang terekam didalam ingatan masyarakat, yang kemudian diolah atau dibayangkan kepada suatu objek yang berupa adanya konflik. Persepsi sosiologis dapat diartikan sebagai proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi tentang orang lain. Persepsi sosiologis merupakan sebuah konstruksi, pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari pandangan masyarakat, serta merujuk pada bagaimana orang mengerti dan mengategorisasikan setiap masalah yang dihadapi dikehidupan masyarakat. Perlu diperhatikan bahwa mencakup kepribadian, sifat-sifat, tingkah laku masyarakat, karakteristik fisik, dan kemampuan menilai persepsi masyarakat perlu diperhatikan dengan sebaik mungkin, baik itu

melalui sifat-sifat budaya dan adat kebiasaan masyarakat, hal tersebut perlu diperhatikan agar informasi yang didapatkan terarah agar peneliti bisa menyimpulkan hasil yang dapat membantu memecahkan masalah.

Terutama pada persepsi masyarakat untuk mengenali dan memperoleh kepastian tentang masalah yang terjadi perlu adanya bukti yang kuat, sebagaimana adanya *safety needs* dalam *hirarki* kebutuhan *Maslow*, dan persepsi membuat kita siap menghadapi kemungkinan yang terjadi. Dalam interaksi sosial kita tidak hanya sekedar mengerti siapa yang kita hadapi, tetapi perlu juga untuk meramalkan atau mengantisipasi sikap dan perilaku orang lain, dengan siapa kita berinteraksi, agar interaksi tersebut berjalan dengan lancar.¹²

Persepsi sosiologis adalah aktivitas mempersepsikan orang lain dan apa yang membuat mereka dikenali, melalui persepsi sosiologis kita berusaha mencari tahu dan mengerti orang lain. Sebagai bidang kajian, bahwa bagaimana orang membentuk kesan dan membuat kesimpulan tentang orang lain.

Teori-teori dan penelitian persepsi sosiologis berurusan dengan kodrat masyarakat, penyebab-penyebab, dan konsekuensi dari persepsi terhadap satuan-satuan sosial, seperti diri sendiri, individu lain, kategori-kategori sosial, dan kumpulan atau kelompok lain tempat seseorang

¹² P.O Ngakan, Komaruddin, Achmad Wahyudi, (2010) Persepsi dan Partisipasi Masyarakat.

bergabung atau kelompok lainnya. Jadi, Persepsi sosiologis juga merujuk pada bagaimana orang mengerti dan mengategorisasi setiap masalah yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini seperti kaitannya dalam kondisi social dimana artis yang kemudian terjun dalam dunia perpolitikan yang bahkan kita lihat hal ini memicu adanya interpretasi tertentu yang berbeda antara beberapa individu ataupun kelompok.

2.4. Kerangka Teori

Dalam proposal penelitian ini penulis menggunakan perilaku politik sebagai landasan teori. Teori ini sangat menunjang untuk menganalisis dalam mencari jawaban dari penelitian penulis yang berjudul Keterlibatan Perempuan dalam Kontestasi Politik (Studi Tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Keterlibatan Perempuan Dalam Pemilihan Walikota Makassar 2020).

1. Perilaku Politik

Dalam hal ini menurut Ramlan Surbakti Perilaku politik dirumuskan sebagai segala sesuatu kegiatan yang berkenaan dengan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Yang melakukan kegiatan adalah pemerintah dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada dasarnya dibagi dua, yaitu fungsi-fungsi pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat.¹³

Pendekatan perilaku (behavioralisme) ini menjelaskan mengenai individu yang melakukan kegiatan politik secara aktual dan perilaku individu mempunyai berbagai macam karakternya.

Perilaku politik dijadikan sebagai pendekatan dalam ilmu politik yang dikembangkan oleh kaum behavioralis dengan menekankan pada aspek individual sebagai insan politik yang mampu melihat sistem-sistem dari lembaga politik. Adapun dibalik tindakan lembaga politik dan pemerintah, seperti keputusan pemerintah, tindakan legislatif, keputusan pengadilan dan partai politik.¹⁴

Tindakan ataupun keputusan politik ini selain tidak hanya ditentukan oleh fungsi (tugas dan wewenang) yang melekat pada lembaga. Akan tetapi, adanya dorongan, persepsi dan motivasi, sikap dan orientasi, harapan dan cita-cita, ketakutan dan pengalaman masa lalu individu yang

¹³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 167.

¹⁴ David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, penj. Setiawan Abadi (Jakarta: LP3ES; 1987), cet. II, h. 209.

berupaya untuk membuat keputusan tersebut.¹⁵ Dalam perilaku politik terdapat tiga hal pokok yang dijadikan sebagai unit analisis yaitu, individu aktor politik, agregasi politik dan tipologi kepribadian politik¹⁶. Adapun kategori yang lainnya adalah individu aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivitas politik dan individu warga biasa. Perilaku politik dapat berupa seperti halnya perilaku masyarakat dalam menentukan sikap dan pilihan dalam pelaksanaan pemilu. Adapun perilaku politik dibagi dua, yaitu:

- a. Perilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah.
- b. Perilaku politik warga Negara baik secara individu maupun kelompok.¹⁷

Adapun dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik, dapat dipilih tiga unit analisis, yaitu:

- a. Aktor politik meliputi (aktor politik, aktivitas politik dan individu warga negara biasa).
- b. Agregasi politik yaitu: individu aktor politik secara kolektif seperti: partai politik, birokrasi, lembaga-lembaga pemerintahan.
- c. Tipologi kepribadian politik yaitu: kepribadian pemimpin seperti: Otoriter, Machiavelist dan Demokratis.¹⁸

¹⁵ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 168

¹⁶ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik h. 169

¹⁷ Sujijono Sastroatmodjo, Perilaku Politik (Semarang: Ikip Semarang Press, 1995), h. 2

¹⁸ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, h. 132

Jadi keterkaitan antara teori yang saya ambil dengan proposal penelitian saya yang berjudul Keterlibatan Perempuan dalam Kontestasi Politik (Studi Tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Keterlibatan Perempuan dalam Pemilihan Walikota Makassar 2020). Dilihat dari teori perilaku yang menekankan pada aspek individual sebagai insan politik yang mampu melihat sistem-sistem dari lembaga politik. Tindakan ataupun keputusan politik ini selain tidak hanya ditentukan oleh fungsi (tugas dan wewenang) yang melekat pada lembaga. Akan tetapi, adanya dorongan, persepsi dan motivasi, sikap dan orientasi, harapan dan cita-cita, ketakutan dan pengalaman masa lalu individu yang berupaya untuk membuat keputusan tersebut. Jadi dari dorongan persepsi itulah yang akan menghasilkan partisipasi politik masyarakat khususnya melihat keterlibatan perempuan dalam pemilihan walikota makassar hingga menentukan keputusannya yang hasil akhirnya akan menentukan partisipasi masyarakat.

Kemudian perlu kita ketahui perilaku politik yaitu berupa adanya bentuk keikutsertaan dari masyarakat seperti partisipasi politik. Partisipasi politik ialah kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum dan sebagainya. Kemudian Hebert McClosky berpendapat mengenai partisipasi bahwa: "The term political participation

will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and directly or indirectly, in the formation of public policy" (Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses kebijakan umum). ¹⁹Partisipasi politik sama dengan kesadaran politik seseorang untuk ikutserta dalam politik. Karena semakin sadar dirinya memiliki hak dalam politik dan individu memberikan dukungan berupa hak suara. Kebanyakan kesadaran politik ini dimulai dari orang berpendidikan, kehidupan yang memadai dan orang-orang yang terkemuka. Jika seseorang mengetahui kesempatan-kesempatan dalam melakukan partisipasi yang efektif dalam membuat keputusan, maka mungkin mereka akan percaya bahwa partisipasi itu merupakan sesuatu yang bermanfaat dan kesadaran yang tumbuh untuk berpartisipasi aktif. Partisipasi politik mempunyai tujuan dalam memberikan peluang bagi kelompok masyarakat yang pada dasarnya memiliki kondisi berbeda baik secara sosial-ekonomi, etnik-budayanya terutama untuk mengungkapkan kepentingannya melalui lembaga politik yang mampu mempengaruhi perumusan kebijakan politik.

¹⁹ Herbert McClosky, "Political Participation", *International Encyclopedia of the Social Sciences*, ed. Ke-2 (New York: The Macmillan Company, 1972), h. 252.

2.5. KONSEP PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi

Dalam hal ini perlu kita ketahui banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata Bahasa Inggris “*participation*” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan.²⁰ Slamet mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik.²¹ Masyarakat dalam berpartisipasi dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Adapun Robert Chambers menyebutkan ada 3 model partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli²². Seperti menurut Arnstein yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat terdapat 8 tingkatan, berbeda dengan Kenji dan Greenwood justru dalam membagi jenjang partisipasi dipersempit menjadi 5 tingkatan. Sedangkan

²⁰ Pius A. Partan dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya: Arkola, 2006), Hal. 655.

²¹ Y. Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), Hal. 7.

²² Robert Chambers, *Ideas For Development*, (London: Earthscan, 2005), Hal. 105.

VeneKlasen dengan Miller membagi jenjang partisipasi berjumlah 7 tingkatan.

Jenjang partisipasi masyarakat dapat direncanakan sesuai dengan konteks dan kebutuhan tertentu. Dari ketiga model partisipasi masyarakat tidak ada klaim yang menegaskan sebagai satu-satunya jenjang yang paling benar dan yang paling otoritatif.²³ Definisi dari “partisipasi” masyarakat adalah sebuah bentuk pemaknaan tentang praktek yang baik.²⁴ Individu atau kelompok dapat diikutsertakan untuk membangun partisipasi mereka sendiri. Jenjang partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kata “partisipasi” dapat digunakan untuk aktivitas dan hubungan yang berbeda. Jenjang partisipasi masyarakat juga dapat menunjukkan bahwa masing- masing model partisipasi merupakan semuanya berbicara tentang kekuasaan. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan dan memperbaiki kebiasaan masyarakat untuk lebih baik.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, Sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan

²³ Robert Chambers, *Ideas For Development*, (London: Earthscan, 2005), Hal. 106. (digilib.uinsby.ac.id)

²⁴ *Ibid.*

keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.²⁵

Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

²⁵ Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*. Semarang: Ikip Semarang Press, 1995. Hlm. 56

Bercermin dari kasus yang saya angkat disini yakni mengenai keterlibatan perempuan dalam kontestasi politik, hal ini sangat menarik sebab timbulnya beberapa persepsi dari masyarakat ataupun interpretasi yang berbeda dalam kasus ini, yakni menyangkut persepsi terkait kuota 30% suara perempuan dan sehubungan dengan banyaknya pemilih perempuan namun belum ada perempuan yang di usung sebagai walikota, dan wakil walikota pun lolos dalam pemilihan.

Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya²⁶. Artinya disini seperti judul yang saya angkat yakni pada konteks Pilkada, bagaimana masyarakat ikut serta dalam pemilu sehingga menentukan pilihannya dengan beberapa persepsi yang berbeda antar masyarakat utamanya dalam mengenai keterlibatan perempuan dalam pemilihan Walikota Maupun Wakil Walikota Makassar.

Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam

²⁶ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007, hlm. 140

proses pembentukan kebijakan umum.²⁷ Dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.²⁸

Miriam Budiardjo secara umum mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).²⁹ Terakhir menurut Keith Faulks partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi oposisi, yang penting partisipasi merupakan proses aktif³⁰.

²⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 367

²⁸ Lot.,cit 7 Sudijono Sastroadmojo, op.,cit. Hlm. 68 8 Keit Faulks, op.cit, hlm. 226

²⁹ Sudijono Sastroadmojo, op.,cit. Hlm. 68

³⁰ Keit Faulks, op.cit, hlm. 226

Jadi dari beberapa pendapat ahli diatas maka dapat saya simpulkan bahwa partisipasi politik adalah adanya kegiatan atau keikutsertaan warga negara dalam proses pemerintahan. Kemudian kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi jalannya pemerintahan. Sehingga dengan adanya partisipasi politik tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan pasrtisipasi pasif.

- Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah.
- Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.³¹

Sementara itu, Milbart dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. Pertama, apatis. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, spectator.

³¹ Ramlan Surbakti, op.,cit. Hlm. 142

Artinya, orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, gladiator. Artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.³²

Dalam hal ini Gaffer pun menerangkan bahwa peran serta atau partisipasi politik warga masyarakat ke dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Electoral activity. yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan Pemilu/pilkada. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta dalam memberi sumbangan untuk kampanye atau rally politik sebuah partai, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih sebuah partai politik atas nama partai itu, memberikan suara dalam pemilu, mengawasi pelaksanaan pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan dan lain-lainnya. Artinya jika kita kaitkan dalam konteks proposal ini bagaimana masyarakat berperan aktif dalam Pilkada dengan merujuk pada fenomena yang kemudian menjadi pro kontra dalam masyarakat yakni dengan banyaknya artis yang kemudian terjun langsung dalam politik yakni masuk dalam partai politik itu sendiri dan dengan mudah kemudian di usung oleh partai politik. Sehingga memunculkan persepsi yang

³² Ibid., hlm. 143

berbeda antar masyarakat atau partisipasi Electoral activity masyarakat berjalan yakni dengan melihat fenomena dan kemudian memberi respon.

2. Lobbyng, Yaitu tindakan seseorang, ataupun sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhi pemerintah atau tokoh politik tersebut yang menyangkut masalah tertentu tentang yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk memperoleh dukungan ataupun untuk mobilisasi dukungan atau dan tantangan terhadap masalah-masalah tertentu yang hendak ditangani oleh pemerintah atau lembaga perwakilan rakyat. Dalam hal ini melihat dari penjelasan lobbyng politik diatas bagaimana seseorang mencoba menghubungi atau dengan kata lain adanya intraksi dapat dilihat bagaimana interaksi public figure yang kemudian berpindah haluan dari latar belakang keartisannya kemudian terjun dalam dunia politik dan dengan bantuan partai politik itu sendiri yakni diusung menjadi kepala daerah dan kemudian ada beberapa yang telah lolos dalam pilkada. Disini sangat jelas adanya lobbyng politik yang terjadi.
3. Organizational, Yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam berbagai organisasi sosial dan politik, apakah itu sebagai pimpinan, aktivis ataukah sebagai anggota biasa. Organisasi tersebut mempunyai fungsi mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan

kebijakan publik. Ada organisasi yang memusatkan perhatiannya terhadap isu-isu yang sifatnya spesifik, seperti misalnya wahana lingkungan hidup Indonesia (WLHI), dan ada pula yang mempunyai kepentingan berbagai macam isu, seperti misalnya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang mempunyai kepedulian terhadap masalah hukum, HAM dan demokrasi. Ada organisasi yang memusatkan perhatiannya pada masalah keagamaan. Menjadi anggota saja sudah menunjukkan elemen dari partisipasi sekalipun seseorang belum tentu terlibat langsung mempengaruhi.

4. Contacting, Yaitu partisipasi yang dilakukan oleh warga Negara dengan secara langsung (mendatangi tempatnya bertugas, menghubungi lewat telepon) pejabat pemerintah ataupun tokoh politik, baik dilakukan secara individual ataupun kelompok orang yang sangat kecil jumlahnya. Biasanya dengan bentuk partisipasi seperti ini akan mendatangkan manfaat bagi orang yang melakukan partisipasi tersebut.
5. Violence, Yaitu cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah juga dapat dimasukkan dalam kategori partisipasi politik, hanya saja cara yang ditempuh untuk mempengaruhi

pemerintah dengan melakukan pengrusakan terhadap barang atau individu.³³

Mengutip dari pernyataan Nelson yang menyebutkan adanya dua macam bentuk partisipasi:

- a. Partisipasi horizontal, yaitu partisipasi diantara sesama warga atau anggota masyarakat dimana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan pembangunan.
- b. Partisipasi vertikal yaitu partisipasi antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut atau klien.

Jadi dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa seseorang baru dikatakan berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan jika individu itu benar-benar melibatkan diri secara utuh dengan mental dan emosinya bukan sekedar hadir dan bersikap pasif terhadap aktifitas tersebut. Adapun rasa tanggung jawab sebagai salah satu unsur dari partisipasi, sebagaimana yang merupakan aspek yang menentukan dalam pengambilan keputusan individu untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan dan hal itu akan menjadi atau akan dialami pula

³³ Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2 (2) (2014): 166-175
Agung Suharyanto, Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah
154

oleh masyarakat yang ikut serta dalam partisipasi khususnya partisipasi politik.

Artinya disini dapat kita lihat kaitannya dalam proposal penelitian saya yang mengangkat kasus tentang persepsi masyarakat tentang keterlibatan artis dalam pilkada. Sangat jelas dilihat bagaimana masyarakat kemudian berpartisipasi yakni dengan melibatkan diri melihat fenomena ini dengan bukti munculnya prokontra atau penafsiran yang berbeda satu sama lain.

3. Jenjang Partisipasi Politik

Menurut pernyataan Sherry R Arnstein yang dikutip oleh Sigit, bahwa membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 8 tingkat partisipasi masyarakat dengan berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat.³⁴ Tingkat partisipasi dari tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut:

1. Citizen control, masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya.

³⁴ dikutip dalam Sigit, Sigit Wijaksono, "*Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat Dalam pengelolaan lingkungan pemukiman*", Jurnal comtech Vol.4 No.1 Juni 2013, Hal. 27.

Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Usaha bersama warga ini langsung berhubungan dengan sumber dana untuk memperoleh bantuan tanpa melalui pihak ketiga.³⁵

2. Delegated power, pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengadakan negosiasi dengan masyarakat tidak dengan tekanan dari atas, dimungkinkan masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah.
3. Partnership, masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi.³⁶
4. Placation, pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, di mana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Walaupun

³⁵ *Ibid.* Jurnal teori partisipasi hal 33.

³⁶ *Ibid.*, Hal. 28.

dalam pelaksanaannya usulan masyarakat tetap diperhatikan, karena kedudukan relatif rendah dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah maka tidak mampu mengambil keputusan.³⁷

5. Consultation, masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah survei tentang arah pikiran masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan public hearing atau dengar pendapat dengan masyarakat.³⁸
6. Informing Informing, pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana yang telah disusun.³⁹
7. Therapy, pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat

³⁷ *Ibid.* Digilib.uinsby.ac.id

³⁸ *Ibid.*, Hal. 28.

³⁹ *ibid*

dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat dari pada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.

8. Manipulation, merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan public dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi⁴⁰

Jadi Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah di tuliskan diatas, peneliti menggunakan teori- teor atau konsepi yang berkaitan untuk dijadikan pisau analisis. Teori atau konsep ini dipergunakan untuk menganalisis bagaimana pandangan/persepsi msyarakat terhadap perempuan dalam kontestasi politik khususnya masyarakat yang berada di Makassar. konsep Partisipasi Masyarakat, konsep ini adalah yang akan digunakan peneliti untuk menemukan jawabannya.

⁴⁰ *Ibid*

2.6. KERANGKA BERFIKIR



Jadi dari uraian di atas dapat saya gambarkan melalui kerangka berfikir dimana kita lihat atau merujuk pada keterlibatan Perempuan Dalam Kontestasi politik artinya dalam proposal yang saya tuliskan ini melihat Perempuan dalam politik khususnya dalam pemilihan Walikota Makassar dilihat dari teori perilaku dalam politik yang menghasilkan pengaruh dari persepsi yakni dapat kita bedakan persepsi masyarakat yakni melalui eksternal perception yang artinya persepsi yang terjadi karena datangnya rangsangan dari luar individu. Kemudian yang kedua adalah self perception yaitu dimana persepsi yang terjadi karena datangnya rangsangan dari dalam individu dalam hal ini objeknya adalah diri sendiri. Dari kedua hal tersebut lahirlah persepsi masyarakat yang kemudian akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat itu sendiri.